

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA****(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Desember 2018/Khusus - Awal Menjabat)**

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL
SUB UNIT KERJA : BIRO SUMBER DAYA MANUSIA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **LUCKY FIRNANDY MAJANTO**
2. Jabatan : **KEPALA BIRO SDM**
3. NHK : **518874**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp.** **2.055.743.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 39.2 m2/32 m2 di TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/75 m2 di KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 313.395.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/60 m2 di KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 301.260.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/126 m2 di KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 741.968.000
5. Tanah Seluas 1058 m2 di CIANJUR, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
6. Tanah Seluas 400 m2 di CIANJUR, HASIL SENDIRI Rp. 48.000.000
7. Tanah Seluas 676 m2 di CIANJUR, HASIL SENDIRI Rp. 81.120.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **810.000.000**

1. MOBIL, KIA NEW PICANTO SE 1.1L M/T MOBIL PENUMPANG Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
2. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT DAKAR Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
3. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
4. MOBIL, KIA PICANTO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.



80.000.000

5. MOBIL, NISSAN MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.

80.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp.

D. SURAT BERHARGA

Rp.

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp.

1.122.783.744

F. HARTA LAINNYA

Rp.

Sub Total

Rp.

3.988.526.744

III. HUTANG

Rp.

239.828.913

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

3.748.697.831

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **31 Januari 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.